

Implementasi Program *Three End's* sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga di Kota Makassar

Andi Kasmawati¹, Lu'mu Taris²

^{1,2}Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar

Abstract. This study aims to find out: a. The implementation of the three end program is an effort to improve the social welfare of children and families in the city of Makassar. b. Factors that become obstacles to the implementation of three end's in Makassar City. c. The right strategy is implemented in implementing the three end program in Makassar City. This research is qualitative research, data comes from observation, interviews, and documentation. Primary data source (main) and secondary data source (additional). To collect data in this study used data collection techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation. Data that has been collected, both primary and secondary data are analyzed qualitatively and subsequently described. A. The implementation of the Three End's Program in Makassar City, carried out in two forms, the first form was carried out directly by the PPPA ministry in the form of program socialization and launching, and the second was carried out by the PPPA Office of Makassar City in various PPPA service programs according to the respective fields of the three programs. must end, namely end the violence against women and children, end human trafficking and end economic inequality. B. Factors that hinder the implementation of the three-end program in Makassar City. There are external obstacles in the field, when handling cases of violence and other cases, the parties want their cases to be over quickly, impatient through the process of resolving disputes or cases experienced, another obstacle is the absence of one party if they want to be mediated or asked for information. C. The right strategy is implemented in implementing the three end's program in the city of Makassar, which is to make the three end's program a sustainable basic activity, motivate victims to be open to cases that occur through socialization and community approaches, synergize relevant institutions and agencies to facilitate dissemination program implementation.

Keywords : Three end's program, social prosperity, family

1. PENDAHULUAN

Three End's merupakan program prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2019. Three end's terdiri dari tiga hal yang harus diakhiri dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, (Lampiran Program Prioritas/Keunggulan 2016) yaitu: 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 2. Akhiri Perdagangan Manusia. 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi. Program strategis ini sudah dijalankan oleh satuan-satuan tugas, kementerian/lembaga terkaik baik secara internal pada kementerian PPPA maupun diluar kementerian PPPA dalam bentuk kerja sama dengan lembaga atau instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta, upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk program telah dilaksanakan baik dalam bentuk regulasi maupun teknis.

Kementerian PPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Di antaranya, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemulihan Korban KDRT. Bahkan saat ini juga tengah digodok Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni UU No. 21

Tahun 2017 tentang Pemberantasan TPPO serta telah terbentuk 32 gugus tugas PP-TPPO di tingkat provinsi dan 192 kabupaten/kota walaupun hingga saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang dikeukakan diatas maka melalui peneitian ini akan didapatkan sousi mengenai: a. Bagaimana pelaksanaan program three end's sebagai upaya meningkatkan kesejateraan sosial anak dan keluarga di Kota Makassar? b. Faktor-Faktor apa yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar? c. Strategi apa yang tepat diterapkan dalam mengimplemetasikan program three end's di Kota Makassar

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian kualitatif deskriptif maka cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Sumber data terdiri dari sumber data primer (utama) yang berupa kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data sekunder (tambahan) yang berupa dokumentasi seperti buku, majalah, koran, foto foto, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, baik

data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Three End's

Three End's merupakan program unggulan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan program nasional yang pelaksanaannya diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Program three end's merupakan kebijakan yang menacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Inpres No. 9 Tahun 2009 tentang Percepatan Pengarus Utamaan Gender, Pencanangan Kota Layak Anak yang mengacu pada UU Perlindungan Anak dan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan asas legalitas, dimana segala sesuatu program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjabarkan program three end's menurut kepala Dinas PPPA Kota Makassar Andi Tenri Palallo (wawancara, 13 Nopember 2018). "Program three end's di Kota Makassar, dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian PPPA dan program yang three end's yang diintegrasikan ke Dinas PPPA Kota Makassar" dengan cara menjabarkan program three end's kedalam berbagai program pada bidang masing masing. Pada program akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, dan akhiri perdagangan orang ditangani oleh bidang perlindungan perempuan dan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, sedangkan akhiri kesenjangan ekonomi ditangani oleh bidang Kualitas hidup perempuan". Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dikatakan bahwa program unggulan Kementerian PPPA tersebut, belum menetapkan atau membuat program khusus yang menjabarkan program three end's sebagai program yang berdiri sendiri untuk dilaksaakan oleh dinas PPPA provinsi dan dinas PPPA Kabupaten/Kota. Program three end's senyogyanya tidak lagi diintegrasikan kedalam program kerja PPPA Kota Makassar akantetapi dijabarkan lansung dari program three end's dari kementerian, yang didukung oleh anggaran serta sarana dan prasarana, sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah berdasarkan Undang undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pembagian urusan atara pemerintah (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Pasal 6), sedangkan pemerintah

daerah melaksanakan program tersebut dan selanjutnya di monitoring, dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Dinas PPPA Kota Makassar dalam menjalankan program three end's selain melakukan penanganan terhadap kasus, juga melakukan sosialisasi pada masyarakat yang berkaitan dengan materi three end's. Pada tahap sosialisasi ini materi yang disampaikan kepada masyarakat menurut kepala bidang perlindungan perempuan ibu Hj. Hapidah Djalante, materi yang sampaikan adalah: "Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Peningkatan Ekonomi (mengajak perempuan untuk berperan aktif), Hentikan perdagangan orang. Pembentukan komunitas tindak pidana perdagangan orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang." "Adapun Metode yang digunakan dalam menjalankan program three end's adalah metode partisipatif, dengan cara pelibatan warga secara langsung dalam melaksanakan kegiatan". Sedangkan anggaran yang digunakan dalam program three end's yang terintegrasi dalam kegiatan PPP A adalah APBD yang membiayai kegiatan, Pemberdayaan masyarakat (Bidang Kualitas Hidup Perempuan), TPPO (Bidang Perlindungan Perempuan), Pencegahan KDRT (Bidang Perlindungan Perempuan)". Dengan demikian dapat dikatakan program three end's di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kegiatan dari dinas PPPA Provinsi dan dinas PPPA Kabupaten/Kota. Dengan kata lain program three end's tidak memberikan program khusus yang disertai petunjuk teknis kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Program Three End's

Kendala yang dialami pada pelaksanaan three end's di Kota Makassar hanya kendala eksternal dilapangan, dalam menangani kasus kekerasan maupun kasus lainnya seperti para pihak ingin cepat selesai kasusnya, tidak sabaran mengikuti tahapan tahapan proses penyelesaian sengketa atau kasus yang dialami tersebut. Kendala lainnya adalah bila para pihak ingin diperemukan salah satu pihak tidak hadir, maka tertundalah proses penyelesaian kasusnya." Lebih lanjut dikatakan bahwa "pelaksanaan three end's di kota Makassar tidak mengalami kendala yang berarti, ketika petugas melaksanakan sosialisasi masyarakat sangat antusias, mereka aktif menanyakan hal hal yang tidak dipahami. Pada saat menjaankan tugas dilapangan para pelaksana sudah mempersiapkan diri. Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut pelaksanaan program three end's di Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti, semua dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki serta fasilitas yang tersedia. Mereka selalu siap melayani kebutuhan masyarakat.

C. Strategi yang Tepat Diterapkan dalam Mengimplementasikan Program Three End's

Pelaksanaan program three end's di Kota Makassar tidak memiliki strategi khusus, semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai program PPPA, program three end's tidak dilaksanakan secara khusus tapi diintegrasikan kedalam program dinas PPPA kota Makassar. Pelaksanaan three end's oleh kemenerian PPPA tidak ada petunjuk pelaksanaan yang baku, semua pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing masing." Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan pada wawancara, bahwa pelaksanaan program three end's di kota Makassar tidak ada strategi khusus yang gunakan dan tidak ada petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh kementerian PPPA kepada dinas PPPA kota Makassar, program three end's mengikut pada program dinas pemberdayaan perempuan yang tersebar ke bidang bidang yang ada, sehingga tehnis pelaksanaan mengacu pada program dinas PPPA Pemerintah Kota Makassar.

4. KESIMPULAN

Program Three End's di Kota Makassar dilaksanakan dalam dua bentuk, bentuk pertama dilaksanakan

langsung oleh kementerian PPPA berupa sosialisasi dan penancangan program, dan kedua dilaksanakan oleh dinas PPPA Kota Makassar secara integratif kedalam berbagai program dinas PPPA sesuai bidang masing dari ketiga program yang harus diakhiri, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi.

Faktor yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar yaitu adanya hambatan dari luar (*eksternal*) dilapangan, ketika menangani kasus kekerasan maupun kasus lainnya, para pihak ingin cepat selesai kasusnya, tidak sabar menjalani proses penyelesaian sengketa atau kasus yang dialami, hambatan lainnya adalah ketidak hadiran salah satu pihak apabila ingin dimediasi atau diminta keterangannya.

Adapun strategi yang digunakan yaitu menjadikan program three end's sebagai kegiatan dasar yang berkesinambungan, memotivasi korban untuk mau terbuka terhadap kasus yang menyimpannya melalui sosialisasi dan pendekatan kemasyarakatan, melakukan sinergi kepada lembaga dan instansi terkait untuk memudahkan penyebarluasan pelaksanaan program.